

Pengaruh Ketergantungan Keuangan, Efisiensi Keuangan, dan *Debt to Equity Ratio* terhadap Keberlanjutan Keuangan (*Financial Sustainability*) pada Pemerintah Provinsi di Indonesia

Kisti Dea Arsita¹, Siska Aprianti², Indra Satriawan³

¹Politeknik Negeri Sriwijaya, kistidearst@gmail.com

²Politeknik Negeri Sriwijaya, siskaaprianti@polsri.ac.id

³Politeknik Negeri Sriwijaya, indrasatriawanggl@polsri.ac.id

ABSTRACT

This study was conducted to examine the effect of financial dependence, financial efficiency, and the debt-to-equity ratio (DER) on financial sustainability in provincial governments in Indonesia during the 2020–2024 period. This study uses secondary data sourced from the Provincial Government Financial Reports audited by the Supreme Audit Agency (BPK) of the Republic of Indonesia, with a total of 170 observations covering 34 provincial governments. The analysis was conducted using a panel data regression approach with the Random Effects Model (REM) using the EViews 13 software. The results indicate that financial dependence and financial efficiency have a significant negative impact on financial sustainability, suggesting that high dependence on transfer funds and low efficiency in local financial management tend to reduce the financial sustainability of provincial governments. Meanwhile, the Debt-to-Equity Ratio (DER) did not show a significant effect on financial sustainability. Collectively, the three variables exert a significant influence on the financial sustainability of provincial governments in Indonesia. These findings underscore that strengthening fiscal autonomy and improving the efficiency of local financial management are critical factors in supporting the financial sustainability of provincial governments in Indonesia.

Keywords: *Financial Dependence, Financial Efficiency, Debt to Equity Ratio, Financial Sustainability, Provincial Government*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ketergantungan keuangan, efisiensi keuangan, dan *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*) pada pemerintah provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (LKP Provinsi) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode tahun 2020–2024. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yang menghasilkan 34 provinsi sebagai sampel penelitian dengan total 170 observasi. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis regresi data panel menggunakan *Random Effect Model* (REM) yang diolah melalui perangkat lunak *Eviews* 13. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan dan efisiensi keuangan masing-masing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keberlanjutan keuangan, yang berarti semakin tinggi tingkat ketergantungan keuangan dan rasio efisiensi keuangan pemerintah provinsi, maka semakin rendah tingkat keberlanjutan keuangannya. Sebaliknya, *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlanjutan keuangan. Secara simultan, hasil penelitian membuktikan bahwa ketergantungan keuangan, efisiensi keuangan, dan *Debt to Equity Ratio* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia, dengan nilai *Adjusted R²* sebesar 12,87%, yang mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain di luar model yang turut memengaruhi keberlanjutan keuangan daerah.

Kata Kunci: Ketergantungan Keuangan, Efisiensi Keuangan, *Debt to Equity Ratio*, Keberlanjutan Keuangan, Pemerintah Provinsi

A. PENDAHULUAN

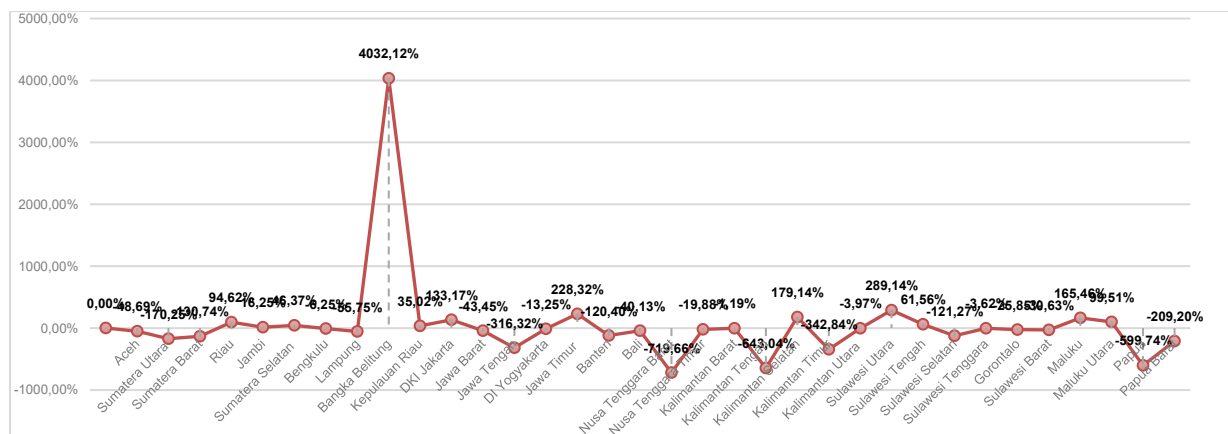
Pembangunan berkelanjutan menjadi agenda global sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun



2015, yang memuat 17 tujuan untuk diwujudkan pada tahun 2030 terutama untuk mengatasi berbagai permasalahan global seperti memperkuat perdamaian, mengentaskan kemiskinan, melindungi bumi dan lain sebagainya (United Nations General Assembly, 2015). Dalam pendekatan tersebut, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam pelaksanaan program, tetapi juga sebagai aktor strategis yang turut menentukan arah kebijakan pembangunan (Akbar et al., 2025).

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan berkelanjutan adalah kondisi keuangan negara yang sehat. Guna mendukung hal tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014 khususnya pada pasal 1 ayat 6 UU No 23 Tahun 2023 yang memberikan otonomi kepada daerah untuk mengelola sumber daya dan pendapatannya sendiri. Salah satu tujuannya adalah agar pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya daerahnya untuk meningkatkan pendapatan, sehingga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Miftahurrohman & Putra Prasetya, 2024).

Beban belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terus meningkat seiring bertambahnya pendapatan, dan apabila belanja tersebut melampaui pendapatan yang dihasilkan, pemerintah daerah akan mengalami defisit operasional (Wardhani & Payamta, 2020). Kondisi keuangan yang berkelanjutan juga dapat terganggu apabila beban dan pinjaman pemerintah daerah melebihi pendapatan yang diperoleh. Oleh karena itu, salah satu indikator yang lazim digunakan untuk menilai tingkat keberlanjutan keuangan pemerintah daerah adalah rasio surplus/defisit pada laporan operasional (Lestari et al., 2025). Berikut merupakan grafik rata-rata rasio surplus/defisit laporan operasional pada pemerintah provinsi yang ada di Indonesia tahun 2020-2024.



Sumber: BPK RI, 2026 (data diolah)

**Gambar Rata-rata Rasio Surplus/Defisit Laporan Operasional
Pemerintah Provinsi di Indonesia Periode 2020-2024**

Berdasarkan data rata-rata rasio surplus/defisit laporan operasional pemerintah provinsi di Indonesia periode 2020–2024 menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi mengalami defisit yang cukup besar, meskipun sejumlah provinsi lain seperti Kepulauan Bangka Belitung dan Jawa Timur justru mencatatkan surplus. Fluktuasi tajam ini turut dipengaruhi oleh peningkatan belanja pemulihan ekonomi pada masa pandemi COVID-19 yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah, sehingga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi

tantangan dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan keuangannya dalam jangka panjang (Meilinda et al., 2025).

Keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*) merupakan kondisi ketika pemerintah daerah mampu memenuhi seluruh kewajiban keuangannya sekaligus menyediakan layanan publik secara berkelanjutan tanpa menimbulkan risiko keuangan yang berlebihan (Saputra et al., 2025). Pemerintah daerah yang sehat secara finansial adalah pemerintah yang dapat secara konsisten mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas layanan publiknya (Rosada et al., 2025). Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor determinan keberlanjutan keuangan menjadi penting agar pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan fiskal yang tepat dan berkesinambungan (Lestari et al., 2025).

Salah satu faktor yang diduga berpengaruh adalah ketergantungan keuangan, yaitu ukuran seberapa besar pemerintah daerah bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan operasionalnya (Denisa & Nasution, 2025). Rosada et al. (2025) menemukan bahwa ketergantungan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial sustainability*, sedangkan Mutia et al. (2025) menemukan hasil sebaliknya karena tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat masih sangat tinggi sehingga variasi antar daerah belum cukup untuk memengaruhi keberlanjutan keuangan secara signifikan. Faktor kedua adalah efisiensi keuangan, yaitu kemampuan pemerintah daerah mengelola sumber daya keuangan sesuai kebutuhan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran (Lestari et al., 2025). Lestari et al. (2025) membuktikan bahwa efisiensi keuangan berpengaruh signifikan terhadap *financial sustainability*, tetapi Rosada et al. (2025) dan Mutia et al. (2025) menemukan pengaruh yang tidak signifikan karena belanja pegawai masih mendominasi anggaran daerah sehingga alokasi belanja modal belum optimal.

Selain kedua faktor tersebut, struktur pendanaan pemerintah daerah juga patut diperhatikan. *Debt to Equity Ratio* (DER) menggambarkan sejauh mana suatu entitas bergantung pada sumber pembiayaan eksternal untuk mendukung operasi dan keberlanjutan keuangannya (Syafar et al., 2025). Septiani & Murwaningsari (2024) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *financial sustainability* karena utang yang digunakan untuk membiayai aset produktif dapat meningkatkan keuntungan entitas. Sebaliknya, Pangestu & Hati (2024) menyimpulkan bahwa DER tidak berpengaruh signifikan, karena besar kecilnya proporsi utang bukan penentu utama keberlanjutan keuangan selama entitas masih mampu melunasi kewajibannya.

Penelitian mengenai *financial sustainability* selama ini masih banyak dilakukan di sektor privat, sementara kajian di sektor publik—khususnya yang mengadaptasi indikator *leverage* seperti DER—masih sangat terbatas, padahal pemerintah daerah juga memiliki unsur utang dan ekuitas dalam laporan keuangannya. Di samping itu, hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai ketergantungan keuangan dan efisiensi keuangan juga masih menunjukkan inkonsistensi, sementara penelitian yang mengkaji ketiga faktor tersebut secara bersamaan pada pemerintah provinsi di Indonesia masih terbatas jumlahnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ketergantungan keuangan, efisiensi keuangan, dan *Debt to Equity Ratio* (DER) baik secara parsial maupun simultan terhadap keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*) pada pemerintah provinsi di Indonesia periode 2020–2024. Penelitian ini menghadirkan unsur kebaruan dengan mengadaptasi penggunaan DER dalam menilai *financial sustainability* di sektor publik, sehingga diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi sektor publik sekaligus memberikan masukan bagi



pemerintah provinsi dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan.

B. KAJIAN TEORI

Teori Neo-Institusionalisme

Penelitian ini dilandasi oleh Teori *Neo-Institusionalisme* yang dikemukakan oleh Meyer & Rowan (1977) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Lounsbury & Yanfei Zhao (2014). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku suatu organisasi, termasuk pemerintah daerah, tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh tekanan dari organisasi lain maupun lingkungan sosial yang lebih luas, seperti norma, nilai, aturan, dan kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat. *Neo-institusionalisme* mengacu pada proses keseragaman lembaga yang muncul akibat adanya tekanan dari pihak eksternal. Dalam konteks pemerintah daerah, tekanan tersebut muncul dalam bentuk tuntutan untuk mengelola keuangan secara baik dan akuntabel kepada pemerintah pusat maupun publik, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya agar lebih optimal (Saputra et al., 2025).

Dengan demikian, tingkat ketergantungan keuangan, efisiensi pengelolaan anggaran, dan struktur pendanaan (*leverage*) suatu daerah dapat dipandang sebagai wujud respons kelembagaan terhadap tekanan eksternal tersebut, yang pada akhirnya turut menentukan keberlanjutan keuangannya. Teori ini digunakan sebagai kerangka utama untuk menjelaskan keterkaitan antara ketergantungan keuangan, efisiensi keuangan, dan *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap *financial sustainability* pada pemerintah provinsi di Indonesia.

Keberlanjutan Keuangan (*Financial Sustainability*)

Menurut Al-Obaidi & Almashhadani (2023) A, keberlanjutan keuangan merupakan kondisi di mana defisit fiskal tidak terakumulasi dalam anggaran, sehingga pemerintah tidak perlu mengubah prioritas belanja atau mekanisme pembiayaan untuk menutup defisit di masa depan. Campos & Cysne (2023) mendefinisikan keberlanjutan fiskal sebagai kemampuan pemerintah melunasi utang dalam jangka panjang. Septiani & Murwaningsari (2024) memaknai *financial sustainability* sebagai strategi mempertahankan stabilitas keuangan, pemenuhan kewajiban, dan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan. Sementara itu, Rohmadani et al. (2024) menyebutkan bahwa keberlanjutan finansial adalah kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban keuangan masa kini dan masa depan menggunakan penerimaan seperti pajak dan transfer, sekaligus menyediakan layanan yang berkualitas bagi masyarakat.

Ketergantungan Keuangan

Rasio ketergantungan keuangan diperoleh dengan membandingkan total pendapatan transfer yang diterima pemerintah provinsi dengan total pendapatan provinsi, dimana semakin tinggi nilai dari rasio ini menunjukkan bahwa semakin besar pula tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Mahmudi, 2019). Karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran dan kemiskinan di daerah, daerah harus menghindari dan mengurangi ketergantungannya pada dana transfer dari pemerintah pusat (Febiandani & Aji Suseno, 2018).

Efisiensi Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, efisien merupakan pencapaian keluaran maksimum dengan masukan tertentu, atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai

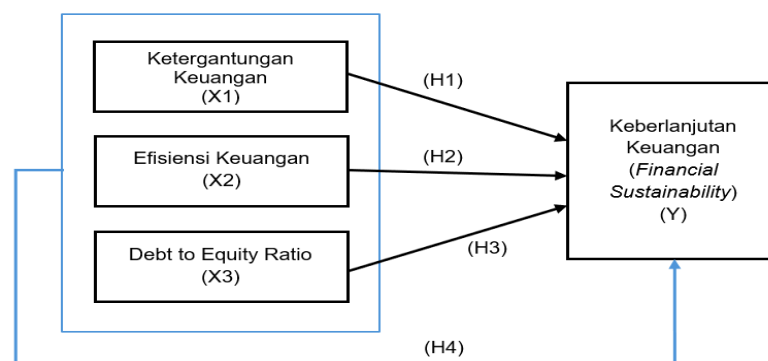
keluaran tertentu. Pemerintah daerah yang menetapkan target efisiensi yang tinggi umumnya lebih terdorong mencari solusi inovatif dan memperbaiki tata kelola keuangan (Rosada et al., 2025). Efisiensi keuangan dapat diukur dengan membandingkan total belanja terhadap total pendapatan berdasarkan realisasi yang diterima (Panawan et al., 2023).

Debt to Equity Ratio

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan total utang dengan total ekuitas (Hery, 2015). Pede & Simamora (2021) menjelaskan bahwa rasio ini menunjukkan besarnya proporsi dana yang berasal dari kreditor dibandingkan dengan dana yang dimiliki entitas sendiri. *Debt to Equity Ratio* biasanya digunakan di sektor perbankan untuk melihat tingkat ketergantungan bank terhadap sumber dana dari utang. Pangestu & Hati (2024) menyatakan bahwa DER yang tinggi menunjukkan bahwa jumlah utang lebih besar dibandingkan modal yang dimiliki sehingga entitas harus menanggung beban pembayaran utang beserta bunganya, yang berpotensi mengganggu keberlanjutan keuangan apabila tidak mampu membayar kewajibannya.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori dan faktor yang telah diidentifikasi sebagai permasalahan penting, sekaligus menjadi dasar dalam menyusun alur pemikiran penelitian (Sugiyono, 2023). Ruang lingkup penelitian ini adalah pemerintah provinsi di Indonesia, dengan variabel independen berupa ketergantungan keuangan, efisiensi keuangan, dan *debt to equity ratio*, serta variabel dependen yaitu keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*). Sebagai dasar dalam merumuskan perumusan hipotesis, berikut disajikan kerangka pemikiran teoritis yang menunjukkan pengaruh variabel ketergantungan keuangan, efisiensi keuangan, dan *debt to equity ratio*.



Sumber: Penulis (2026)

Gambar Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- : Pengaruh Parsial
→ : Pengaruh Simultan

Hipotesis

- H1: Ketergantungan keuangan berpengaruh terhadap *financial sustainability*.
H2: Efisiensi keuangan berpengaruh terhadap *financial sustainability*.
H3: *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap *financial sustainability*.
H4: Ketergantungan keuangan, efisiensi keuangan, dan *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap *financial sustainability*.



C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal yang bertujuan mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2023). Penelitian dilaksanakan pada seluruh pemerintah provinsi di Indonesia menggunakan data sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (LKP Provinsi) tahun 2020–2024 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan diperoleh melalui portal e-ppid.bpk.go.id.

Populasi penelitian ini adalah 38 pemerintah provinsi di Indonesia. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria:

1. Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2020-2024.
2. Memiliki laporan keuangan lengkap dari BPK RI.
3. Data komponen keuangan (*Financial sustainability*, Ketergantungan Keuangan, Efisiensi Keuangan, dan *Debt to Equity Ratio* (DER)).

Berdasarkan kriteria tersebut, empat provinsi hasil pemekaran (Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan) dikeluarkan dari sampel karena belum memiliki laporan keuangan lengkap sejak tahun 2020, sehingga diperoleh 34 provinsi sebagai sampel dengan total 170 unit analisis (34 provinsi × 5 tahun).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak Eviews 13. Pemilihan model estimasi terbaik antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) dilakukan melalui uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Lagrange Multiplier*. Uji asumsi klasik (*normalitas*, *multikolinearitas*, dan *heteroskedastisitas*) turut dilakukan untuk memastikan model regresi bebas dari penyimpangan (Priyatno, 2022). Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Napitupulu et al., 2021). Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji koefisien determinasi *adjusted* (R^2) untuk mengukur besarnya kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen, uji *t* untuk menguji pengaruh secara parsial, dan uji *F* untuk menguji pengaruh secara simultan pada taraf signifikansi 5% (Priyatno, 2022).

Persamaan regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_{it} + \beta_{it1} + \beta_{it2}X_{it2} + \beta_{it3}X_{it3} + \epsilon_i$$

Keterangan:

Y_{it}	=	<i>Financial sustainability</i> (Variabel dependen pada observasi t dan waktu t)
X_{it1}	=	Ketergantungan Keuangan (Variabel independent pertama pada observasi t dan waktu t)
X_{it2}	=	Efisiensi Keuangan (Variabel independent kedua pada observasi t dan waktu t)
X_{it3}	=	<i>Debt to equity</i> (Variabel independent ketiga pada observasi t dan waktu t)
α_{it}	=	Konstanta (<i>Intercept</i> pada observasi t dan waktu t)
β_{it1}	=	<i>Slope</i> untuk variabel independent pertama pada observasi t dan waktu t
β_{it2}	=	<i>Slope</i> untuk variabel independent kedua pada observasi t dan waktu t
β_{it3}	=	<i>Slope</i> untuk variabel independent kedua pada observasi t dan waktu t
β_{it4}	=	<i>Slope</i> untuk variabel independent kedua pada observasi t dan waktu t
ϵ_{it}	=	<i>Error</i>
i	=	Data <i>cross-section</i> yang artinya <i>item</i>
t	=	Data <i>cross-section</i> yang artinya <i>time</i>

Tabel Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator Variabel	Sumber Data	Skala Pengukuran
1	Keberlanjutan Keuangan (Y)	Keberlanjutan keuangan ditentukan berdasarkan pendapatan yang telah disesuaikan, yaitu selisih antara pendapatan operasional dengan beban operasional yang telah dikurangkan dengan pos luar biasa (Bolívar et al. (2021; Wardhani & Payamta, 2020)	$\text{Keberlanjutan Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Operasional} - \text{Beban Operasional} - \text{Pos Luar Biasa}}{\text{Pendapatan Operasional}}$	Laporan Operasional Tahun 2020-2024	Rasio
2	Ketergantungan Keuangan (X1)	perbandingan antara pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah (Mahmudi, 2019)	$\text{Ketergantungan Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024	Rasio
3	Efisiensi Keuangan (X2)	Perbandingan dari total realisasi belanja terhadap total realisasi pendapatan (Rahman & Saputra, 2022)	$\text{Efisiensi Keuangan} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja (Pengeluaran)}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}} \times 100$	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024	Rasio
4	Debt to Equity Ratio (X3)	Perbandingan antara total utang dengan total ekuitas (Hery, 2015)	$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100$	Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2020-2024	Rasio

Sumber: data di olah (2026)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia periode 2020–2024 pada 34 provinsi yang memenuhi kriteria sampel, dengan total 170 observasi. Urutan pembahasan hasil dilakukan secara sistematis, dimulai dari statistik deskriptif, pemilihan model data panel, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, hingga pengujian hipotesis.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel Hasil Statistik Deskriptif

	<i>Financial sustainability</i>	Ketergantungan Keuangan	Efisiensi Keuangan	DER
Mean	614.887,48	0,5846	1,0045	0,2311
Median	524.503,37	0,5987	0,9999	0,2278
Max	11.352.158,06	0,9430	1,1609	0,5424
Min.	-1.966.939,40	0,2640	0,8588	0,0513
Std. Dev.	1.272.231,86	0,1611	0,0361	0,0983

Sumber: Data diolah (Eviews 13) 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama periode 2020–2024, Jawa Barat mencatatkan nilai *financial sustainability* terendah, yaitu defisit sebesar Rp1.966.939,40 pada tahun 2020, sedangkan DKI Jakarta mencatatkan nilai tertinggi



berupa surplus sebesar Rp11.352.158,06 pada tahun 2022, dengan rata-rata sebesar Rp614.887,48 dan standar deviasi *financial sustainability* yang lebih besar yaitu sebesar Rp1.272.231,86 mengindikasikan tingginya variasi kondisi keuangan antar provinsi. Untuk variabel ketergantungan keuangan, Provinsi Banten mencatatkan rasio terendah sebesar 26,40% pada tahun 2023, sedangkan Papua Barat mencatatkan rasio tertinggi sebesar 94,30% pada tahun 2020, dengan rata-rata ketergantungan keuangan provinsi di Indonesia sebesar 58,46%, dan standar deviasi yang lebih kecil yaitu sebesar 16,11% menunjukkan bahwa penyebaran data ketergantungan keuangan antar provinsi tergolong rendah atau tidak ada perbedaan nilai yang signifikan selama periode penelitian..

Variabel efisiensi keuangan menunjukkan rasio terendah pada Kalimantan Timur sebesar 85,88% pada tahun 2022 dan rasio tertinggi pada Papua sebesar 116,09% pada tahun 2023, dengan rata-rata sebesar 100,45% dan standar deviasi yang lebih kecil yaitu sebesar 3,61% . menunjukkan bahwa penyebaran data efisiensi keuangan antar provinsi tergolong rendah atau tidak ada perbedaan nilai yang signifikan selama periode penelitian bahkan cenderung hampir sama. Sementara itu, DER terendah tercatat pada DI Yogyakarta sebesar 5,13% pada tahun 2023 dan tertinggi pada Maluku Utara sebesar 54,24% pada tahun 2021, dengan rata-rata sebesar 23,11% dan standar deviasi yang lebih kecil yaitu sebesar 9,83% yang menunjukkan bahwa penyebaran data DER antar provinsi tergolong rendah atau tidak ada perbedaan nilai yang signifikan selama periode penelitian bahkan cenderung hampir sama.

Pemilihan model regresi data panel yang paling tepat dilakukan melalui tiga tahap pengujian, yaitu uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Lagrange Multiplier*.

Pemilihan Model Data Panel

Uji Chow

Tabel Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests Equation: MODEL_FEM Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.173571	(33,133)	0.0000
Cross-section Chi-square	157.917404	33	0.0000

Sumber: Output data diolah (Eviews 13) 2026

Berdasarkan tabel hasil uji *chow* diperoleh nilai *probability Cross- section F* nilainya adalah 0,0000. Dapat diketahui nilai *probability Cross-section F* < nilai signifikansi 0,05 maka H_0 ditolak sehingga model yang tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

Uji Hausman

Tabel Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: MODEL_REM Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.798611	3	0.6152

Sumber: Output data diolah (Eviews 13) 2026

Berdasarkan tabel hasil uji *hausman* diperoleh nilai *probability Cross- section random* sebesar 0,6152. Dapat diketahui bahwa nilai *probability Cross- section random* > nilai signifikan 0,05 maka H_0 diterima sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Random Effect Model*.

Uji Lagrange Multiplier

Tabel Hasil Uji Lagrange Multiplier

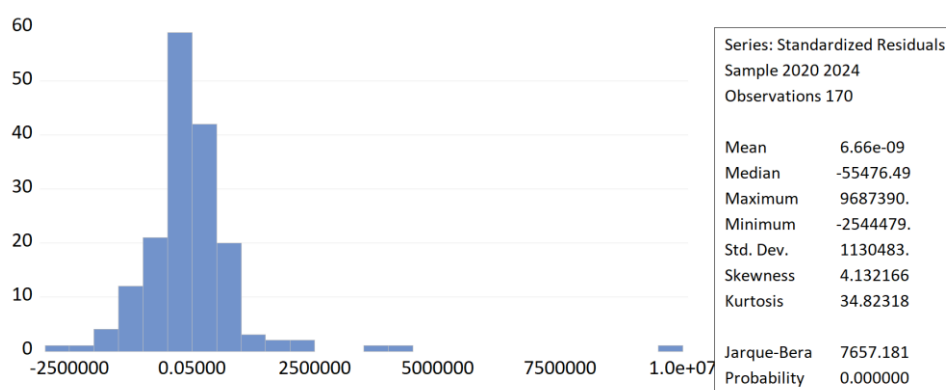
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
Null hypotheses: No effects			
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives			
	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	84.72864 (0.0000)	2.902944 (0.0884)	87.63158 (0.0000)

Sumber: Output data diolah (Eviews 13) 2026

Berdasarkan tabel hasil uji *lagrange multiplier* diperoleh nilai *Breusch-Pagan Both*. Nilai tersebut adalah nilai *p value* dari uji *lagrange multiplier*, dimana nilainya sebesar 0,0000. Dapat diketahui bahwa nilai signifikansi *both Breusch- Pagan* < nilai signifikan 0,05 maka H_0 ditolak, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Random Effect Model* (CEM).

Karena Random Effect Model terpilih pada dua dari tiga pengujian, maka model ini ditetapkan sebagai model estimasi terbaik dalam penelitian ini. Oleh karena model yang terpilih adalah Random Effect Model, uji asumsi klasik pada dasarnya tidak diwajibkan (Badawi et al., 2022). Meskipun demikian, uji tetap dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas



Sumber: Output data diolah (Eviews 13) 2026

Gambar Diagram Pengujian Normalitas

Uji normalitas menghasilkan nilai statistik Jarque-Bera sebesar 7.657,181 dengan probabilitas 0,0000 (< 0,05), yang menunjukkan bahwa residual tidak



terdistribusi normal. Namun demikian, dengan jumlah observasi yang melebihi 30 ($n = 170$), data tetap dapat diasumsikan mendekati distribusi normal berdasarkan teorema limit pusat, sehingga hasil estimasi Random Effect Model tetap dapat dipercaya (Basuki & Yuliadi, 2014).

Uji Multikolinieritas

Tabel Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors Date: 06/18/26 Time: 13:25 Sample: 1 170 Included observations: 170			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	6.03E+12	791.6195	NA
X1	3.11E+11	15.00340	1.053297
X2	6.18E+12	819.8850	1.051808
X3	7.95E+11	6.572195	1.001469

Sumber: Output data diolah (Eviews 13) 2026

Berdasarkan tabel dapat diketahui nilai *centered* VIF ketigas variabel independen kurang dari 10, maka tidak ada masalah *multikolinearitas* pada model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Harvey Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	0.562711	Prob. F(3,166)	0.6404
Obs*R-squared	1.711405	Prob. Chi-Square(3)	0.6344
Scaled explained SS	2.528880	Prob. Chi-Square(3)	0.4701

Sumber: Output data diolah (Eviews 13) 2026

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa nilai *Prob. Chi-Square* pada *Obs*R-squared* sebesar 0,6344. Nilai ini lebih dari 0,05 maka heteroskedastisitas tidak terjadi dalam model regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel Hasil Analisis Regresi dengan Model Random Effect Model

Dependent Variable: Y Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 06/18/26 Time: 14:06 Sample: 2020 2024 Periods included: 5 Cross-sections included: 34 Total panel (balanced) observations: 170 Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10054492	2011988.	4.997291	0.0000
X1	-2599854.	784135.1	-3.315568	0.0011
X2	-7549846.	1923716.	-3.924616	0.0001
X3	-1454361.	1074221.	-1.353876	0.1776

Sumber: Output data diolah (Eviews 13) 2026

Dari tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$\text{Financial Sustainability} = 10.054.492 - 2.599.854X_1 - 7.549.846X_2 - 1.454.361X_3$$

Keterangan:

Y : *Financial sustainability*
X1 : Ketergantungan Keuangan
X2 : Efisiensi Keuangan
X3 : *Debt to Equity Ratio* (DER)

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi Adjusted (R^2)

Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi Adjusted (R^2)

Weighted Statistics			
R-squared	0.144203	Mean dependent var	241722.8
Adjusted R-squared	0.128736	S.D. dependent var	852882.8
S.E. of regression	796093.6	Sum squared resid	1.05E+14
F-statistic	9.323719	Durbin-Watson stat	1.844067
Prob(F-statistic)	0.000010		

Sumber: Output data diolah (Eviews 13) 2026

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,144203 dan Adjusted R^2 sebesar 0,128736. Nilai tersebut berarti bahwa ketergantungan keuangan, efisiensi keuangan, dan DER secara bersama-sama mampu menjelaskan 12,87% variasi *financial sustainability*, sedangkan 87,13% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

Uji t (Uji Parsial)

Tabel Hasil Uji t (Uji Parsial) dengan Model *Random effect Model*

Dependent Variable: Y Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 06/18/26 Time: 14:06 Sample: 2020 2024 Periods included: 5 Cross-sections included: 34 Total panel (balanced) observations: 170 Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10054492	2011988.	4.997291	0.0000
X1	-2599854.	784135.1	-3.315568	0.0011
X2	-7549846.	1923716.	-3.924616	0.0001
X3	-1454361.	1074221.	-1.353876	0.1776

Sumber: Output data diolah (Eviews 13) 2026

Dari tabel hasil uji t, dapat dijelaskan:

- Ketergantungan keuangan (X1) berpengaruh signifikan terhadap *financial sustainability*, dengan nilai t hitung sebesar $-3,315568 < t \text{ tabel } -1,974357764$ dan signifikansi $0,0011 < 0,05$, sehingga H1 diterima.
- Efisiensi keuangan juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap *financial sustainability*, dengan nilai t hitung sebesar $-3,924616 < t \text{ tabel } -1,974357764$ dan signifikansi $0,0001 < 0,05$, sehingga H2 diterima.
- DER tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial sustainability*, dengan nilai t hitung sebesar $-1,353876 > t \text{ tabel } -1,974357764$ dan signifikansi $0,1776 > 0,05$, sehingga H3 ditolak.



Uji F (Uji Simultan)

Tabel Hasil Uji F (Uji Simultan) dengan Random Effect Model

Weighted Statistics			
R-squared	0.144203	Mean dependent var	241722.8
Adjusted R-squared	0.128736	S.D. dependent var	852882.8
S.E. of regression	796093.6	Sum squared resid	1.05E+14
F-statistic	9.323719	Durbin-Watson stat	1.844067
Prob(F-statistic)	0.000010		

Sumber: Output data diolah (Eviews 13) 2026

Berdasarkan tabel, diperoleh nilai F hitung sebesar 9,323719 dengan F tabel sebesar 2,659052 yang ditentukan dengan rumus df_1 (jumlah variabel -1) $4-1 = 3$; df_2 $(n-k-1) = 166$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independent); $\alpha = 0,05$. Karena F hitung > F tabel ($9,323719 > 2,659052$) dan nilai signifikansi sebesar 0,000010 ($< 0,05$), maka H4 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel ketergantungan keuangan, efisiensi keuangan, dan DER secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *financial sustainability*.

Pembahasan

Pengaruh Ketergantungan Keuangan terhadap *Financial Sustainability*

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial sustainability*, dengan nilai t hitung sebesar $-3,315568 < t$ tabel $-1,974358$ dan probabilitas $0,0011 < 0,05$, sehingga H1 diterima. Temuan ini konsisten dengan penelitian Rosada et al. (2025), Fahira et al. (2025), dan Pauziah et al. (2025) yang juga menemukan pengaruh negatif dan signifikan antara ketergantungan keuangan dengan keberlanjutan keuangan. Artinya, semakin tinggi ketergantungan pemerintah provinsi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, semakin rendah tingkat keberlanjutan keuangan yang dimilikinya, sedangkan daerah yang mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menekan ketergantungan pada transfer pusat cenderung memiliki keberlanjutan keuangan yang lebih baik.

Temuan ini juga sejalan dengan teori *Neo-Institusionalisme* yang menjelaskan bahwa organisasi termasuk pemerintah daerah—dipengaruhi oleh tekanan dari lingkungan kelembagaannya. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada lembaga eksternal untuk membiayai operasionalnya, yang berpotensi menghambat otonomi daerah dalam mengelola keuangan dan menetapkan kebijakan sesuai kebutuhan wilayahnya.

Pengaruh Efisiensi Keuangan terhadap *Financial Sustainability*

Variabel efisiensi keuangan juga terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial sustainability*, dengan t hitung sebesar $-3,924616 < t$ tabel $-1,974358$ dan probabilitas $0,0001 < 0,05$, sehingga H2 diterima. Karena rasio efisiensi keuangan dalam penelitian ini dihitung dari perbandingan total realisasi belanja terhadap total realisasi pendapatan, nilai rasio yang tinggi justru mencerminkan pengeluaran daerah yang melebihi pendapatannya atau pengelolaan anggaran yang kurang efisien. Dengan demikian, semakin tinggi rasio efisiensi (semakin tidak efisien pengelolaan anggaran), semakin rendah kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan keuangannya.

Hasil ini sejalan dengan temuan Lestari et al. (2025), Khairunisa et al. (2024), serta Septiani & Murwaningsari (2024), yang menegaskan bahwa efisiensi pengelolaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan keuangan. Dalam perspektif *Neo-Institusionalisme*, pengelolaan anggaran yang efisien merupakan wujud tata kelola kelembagaan yang baik, pemerintah daerah yang mampu mengendalikan belanja dan mengoptimalkan pendapatannya akan lebih mampu mempertahankan keberlanjutan keuangan jangka panjangnya.

Pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap *Financial Sustainability*

Berbeda dengan kedua variabel sebelumnya, DER tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *financial sustainability*, dengan t hitung sebesar $-1,353876 > t$ tabel $-1,974358$ dan probabilitas $0,1776 > 0,05$, sehingga H_3 ditolak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pangestu & Hati (2024), Syafar et al. (2025), dan Pede & Simamora (2021) yang juga menemukan bahwa DER tidak berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya proporsi utang terhadap ekuitas pemerintah provinsi tidak secara langsung menentukan tingkat keberlanjutan keuangannya, selama utang tersebut masih berada dalam batas yang terkendali dan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah.

Dalam teori *Neo-Institusionalisme*, penggunaan utang oleh pemerintah daerah telah diatur secara ketat melalui berbagai regulasi, sehingga penggunaannya relatif terkendali dan tidak serta-merta membebani keberlanjutan keuangan daerah. Dengan demikian, keberlanjutan keuangan pemerintah provinsi lebih ditentukan oleh pengelolaan keuangan secara menyeluruh dibandingkan sekadar besaran proporsi utang terhadap modal sendiri.

Pengaruh Ketergantungan Keuangan, Efisiensi Keuangan, dan DER terhadap *Financial Sustainability* secara Simultan

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar $9,323719 > F$ tabel $2,659052$ dengan probabilitas $0,000010 (< 0,05)$, sehingga H_4 diterima. Hal ini membuktikan bahwa ketergantungan keuangan, efisiensi keuangan, dan DER secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *financial sustainability* pemerintah provinsi di Indonesia. Nilai Adjusted R^2 sebesar $0,128736$ menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan $12,87\%$ variasi keberlanjutan keuangan, sedangkan $87,13\%$ sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model. Berdasarkan teori *neo-institusionalisme*, keberlanjutan keuangan daerah daerah muncul dari interaksi berbagai tekanan institusi yang saling berhubungan. Pemerintah daerah dihadapkan pada tuntutan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pusat, mengatur pengeluaran publik dengan cara yang paling efisien, dan mematuhi batasan terkait rasio utang atau kewajiban. Ketiga unsur ini saling berhubungan, di mana kepatuhan terhadap efisiensi dan otonomi fiskal ditambah dengan pengelolaan kebijakan utang yang terencana, akan menciptakan sistem tata kelola keuangan daerah yang stabil dan berkelanjutan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketergantungan keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*) pada pemerintah provinsi di



Indonesia. Semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah provinsi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, maka tingkat keberlanjutan keuangan pemerintah provinsi tersebut akan cenderung semakin rendah atau menurun.

2. Efisiensi keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*) pada pemerintah provinsi di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya rasio efisiensi yang mencerminkan tingkat ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan daerah, akan menurunkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan keuangannya.
3. *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*) pada pemerintah provinsi di Indonesia. Meskipun secara statistik arah pengaruhnya tidak konsisten atau tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan, hal ini mengindikasikan bahwa variasi dalam rasio utang pemerintah provinsi tidak secara langsung menentukan naik atau turunnya keberlanjutan keuangan dalam periode penelitian ini.
4. Ketergantungan keuangan, efisiensi keuangan, dan *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap keberlanjutan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai F-statistik sebesar 9,324 dan *p-value* (probabilitas F-statistik) sebesar $0,000 < 0,05$, yang menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan mampu menjelaskan variasi keberlanjutan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Namun demikian, nilai *Adjusted R²* yang hanya sebesar 12,87% mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain di luar model yang turut memengaruhi keberlanjutan keuangan daerah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Provinsi: Pemerintah daerah diharapkan terus menekan tingkat ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat dengan cara mengoptimalkan potensi daerah secara mandiri. Pemerintah juga disarankan untuk terus menjaga efisiensi anggaran dengan mengutamakan belanja modal untuk pelayanan publik dibanding belanja operasional. Selain itu, meskipun porsi utang saat ini tidak berdampak buruk secara signifikan, pemerintah harus tetap mengelola pinjaman (DER) secara cermat, akuntabel, dan sesuai aturan agar kewajiban bayar di masa mendatang tidak mengganggu kas daerah.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya: Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel-variabel independen lain yang relevan, mengingat variabel dalam penelitian ini hanya mampu memprediksi keberlanjutan keuangan sebesar 12,87%. Peneliti selanjutnya juga dapat memperluas cakupan objek penelitian (misalnya tingkat pemerintah kabupaten/kota di Indonesia) atau menambah rentang tahun observasi agar hasil yang didapat lebih bervariasi dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, R. R. F., Sari, D. S., & Rezasyah, T. (2025). Inclusiveness Of Actors In The Sustainable Development Goals (Sdgs) Agenda. *Intermestic: Journal of*

International Studies, 10(1), 238–262.
<https://doi.org/10.24198/intermestic.v10n1.6>

- Al-Obaidi, M. B. M., & Almashhadani, A. N. (2023). Financial Sustainability Assessment in Iraq for The Period 2015-2021. *Social Science Journal*, 13.
- Badawi, A., Supardi, Jacob, J., Kadarisman, S., Siahaan, A., Nuraini, A., Vikaliana, R., & Faddila, S. P. (2022). *Riset Terapan Dengan Aplikasi Statistika*. Widina Media Utama. www.penerbitwidina.com
- Basuki, A. T., & Yuliadi, I. (2014). *Electronic Data Processing (Spss 15 dan EvIEWS 7)*. Danisa Media.
- Bolívar, M. P. R., Subires, M. D. L., Muñoz, L. A., & Galera, A. N. (2021). The financial sustainability of local authorities in England and Spain: a comparative empirical study. *International Review of Administrative Sciences*, 87(1), 97–114. <https://doi.org/10.1177/0020852319834721>
- Campos, E. L., & Cysne, R. P. (2023). Public finances sustainability by panel data models with cross-sectional dependence: analysis of Brazilian states. *Nova Economia*, 33(1), 121–151. <https://doi.org/10.1590/0103-6351/7588>
- Denisa, N., & Nasution, D. A. D. (2025). Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Karo. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan*, 4(2), 124–137. <https://doi.org/10.55606/jempper.v4i2.4033>
- Fahira, A., Avianti, I., & Qadri, R. A. (2025). *Determinants of Local Government Financial Sustainability: The Mediating Role of Reserve Funds*. 6(5). <https://doi.org/10.35877/454RI.qems4079>
- Febiandani, R., & Aji Suseno, D. (2018). Analisis Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah dan Ketergantungan Daerah Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan. *Economics Development Analysis Journal*, 5(2), 217–225. <https://doi.org/10.15294/edaj.v5i2.22035>
- Hery. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. CAPS (Center for Academic Publishing Service). <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/>
- Khairunisa, D. R., Saftiana, Y., & Sari, R. (2024). Pengaruh Kemandirian Dan Efisiensi Keuangan Daerah Terhadap Keberlanjutan Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 9152–9158. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10488>
- Lestari, M. A., Sari, K. R., & Hartati, S. (2025). Pengaruh Kemandirian, Efisiensi Keuangan Daerah, dan Dana Transfer Terhadap Financial Sustainability pada Pemerintah Provinsi di Sumatera. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(9). <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i9.9506>
- Lounsbury, M., & Yanfei Zhao, E. (2014). Neo-institutional Theory. In *Oxford Bibliographies Online Datasets*. <https://doi.org/10.1093/obo/9780199846740-0053>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan* (4th ed.). Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN .



- Meilinda, T., Hartati, S., & Aprianti, S. (2025). Pengaruh Kemandirian, Efisiensi, Ketergantungan Keuangan Daerah dan Utang pada Pendapatan Terhadap Keberlanjutan Keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 8(1), 31–46. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v8i1.19773>
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363. <https://doi.org/10.1086/226550>
- Miftahurrohman, A., & Putra Prasetya, B. (2024). Pengaruh Kemandirian Keuangan dan Kinerja Keuangan Terhadap Keberlanjutan Keuangan (Financial Sustainability) Pada Pemerintah Kota Yogyakarta. *Bisman (Bisnis Dan Manajemen): The Journal of Business and Management*, 7(2), 363–372. <https://doi.org/10.36815/bisman.v7i2.3259>
- Mutia, Indriasari, D., & Armaini, R. (2025). Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah dan Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Keuangan Keberlanjutan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 226–235. <https://doi.org/10.47080/gmgahh14>
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Tobing, C. E. R. L. (2021). *Penelitian Bisnis Teknik dan Analisa Data dengan SPSS - STATA - EVIEWS*. Madenatera.
- Panawan, A. R., Kitta, S., & Saripuddin D. (2023). Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Ezenza Journal*, 2, 141–153. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/ej>
- Pangestu, J. C., & Hati, D. P. (2024). Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Financial Sustainability Ratio Sektor Perbankan Di Bei Periode 2019-2022. *Owner*, 8(3), 3007–3017. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2302>
- Pauziah, R., Nurhasanah, & Indriasari, D. (2025). Pengaruh Kemandirian Keuangan, Ketergantungan Keuangan, dan Rasio Utang Terhadap Financial Sustainability Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*.
- Pede, P. F. A., & Simamora, S. C. (2021). Pengaruh Return On Assets dan Debt To Equity Ratio Terhadap Sustainable Growth Rate pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019. *Jurnal Inovatif Mahasiswa Manajemen*, 1(2), 113–123. <https://doi.org/10.35968/dagsk030>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2019).
- Priyatno, D. (2022). *Olah Data Sendiri Analisis Regresi Linier Dengan SPSS & Analisis Regresi Data Panel Dengan EvIEWS*. Cahaya Harapan. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/>

- Rahman, A. Z., & Saputra, F. L. (2022). Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. *Humanika*, 22(2), 117–126. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.54277>
- Rohmadani, D. S., Yulsiati, H., Sari, Y., Akuntansi, J., & Sriwijaya, P. N. (2024). Pengaruh Kemandirian Keuangan dan Rasio Utang terhadap Keberlanjutan Finansial pada Provinsi di Indonesia. *JURNAL MANEKSI*, 13(3).
- Rosada, A., Aprianti, S., & Choiruddin. (2025). Financial Sustainability pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Journal Management, Business, and Accounting*, 24(2), 826.
- Saputra, Y., Haryono, H., Rusliyawati, R., & Astarani, J. (2025). Financial Sustainability pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Journal of Economics and Management Scienties*, 203–210. <https://doi.org/10.37034/jems.v7i3.113>
- Septiani, V., & Murwaningsari, E. (2024). Pengaruh Kecukupan Modal, Efisiensi Operasional dan Diversifikasi Pendapatan terhadap Financial Sustainability. *JURNAL AKUNTANSI DAN AUDIT TRI BHAKTI*, 3(1), 129–145. <https://doi.org/10.59806/jaatb.v3i1.331>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (5th ed.). Alfabeta. www.cvalfabeta.com
- Syafar, N. W., Wahyuni, & Ridwan, M. (2025). Pengaruh Return On Asset dan Debt To Equity Ratio Terhadap Harga Saham Perusahaan Makanan Dan Minuman yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *PARADOKS Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(2).
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.
- United Nations General Assembly. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development Preamble*. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- Wardhani, D. T., & Payamta, P. (2020). Menguji Faktor Determinan Financial Sustainability pada Sektor Pemerintah. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(1), 13. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i1.3305>

